

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

2.1.1.1 Pengertian Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (pihak perusahaan) dan *principal* (pemilik). *Principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk menjalankan suatu jasa atau usaha atas nama prinsipal. Agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh prinsipal. Sehingga pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah agen dan *principal* sebagai pihak yang mengevaluasi informasi (Lestari, 2010).

Teori keagenan ialah suatu perjanjian antara satu atau lebih *principal* dengan agen. Penjabaran dari teori ini yaitu berupa perjanjian yang berisi tentang proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Jensen *and* Meckling, 1976) dalam (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013).

Menurut Eisenhardt (1998) dalam Nurmalita (2016) teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan bagaimana mengorganisir dengan baik hubungan antara prinsipal yang menentukan pekerjaan dengan pihak yang melakukan (agen).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan antara principal dan agen yang mana dalam prakteknya terdapat beberapa tujuan yang berbeda antara kedua belah pihak.

2.1.1.2 Hubungan Keagenan

Chariri dan Ghozali (2007) menjelaskan tiga hubungan keagenan sebagai berikut :

- a. Antara manajemen dengan pemilik, pihak manajer akan melaporkan laba lebih tinggi atau kurang konservatif apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding dengan investor yang lain. Hal ini dikarenakan pemilik menginginkan deviden maupun capital gain dari sahamnya dan manajer ingin dinilai bekerja dengan baik sekaligus mendapatkan bonus. Namun sebaliknya, apabila manajer mempunyai saham yang lebih tinggi daripada investor lain manajer cenderung mengumumkan laba lebih konservatif.
- b. Antara manajemen dan kreditur, pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki labayang tinggi bisa melunasi utang serta bunga pada tanggal jatuh tempo sehingga manajer cenderung melaporkan laba yang lebih tinggi.
- c. Antara manajemen dengan pemerintah, manajer melaporkan laba secara konservatif karena untuk menghindari pengawasan

yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Adanya kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak mengakibatkan terjadinya konflik antara keduanya. Auditor dalam hal ini menjadi pihak ketiga yang akan menjembatani konflik tersebut. Berbagai konflik yang terjadi seperti diatas akan berdampak pada lambatnya penyelesaian laporan keuangan yang dapat menimbulkan *audit delay*. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan lamanya auditor menerima laporan keuangan perusahaan setelah tanggal penutupan buku (31 Desember) (Nurmalita, 2016).

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK No 1 paragraf 10 tahun 2012). Pentingnya kebutuhan akan laporan keuangan hendaknya dilaporkan secara terstruktur yang dapat memberikan informasi secara kualitatif, lengkap, serta dapat dipercaya. Selain itu, laporan keuangan yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan harus menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga para pengguna tidak salah dalam mengambil keputusan.

Menurut Munawir (2002) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Informasi yang diberikan oleh laporan keuangan berguna untuk pengambilan keputusan serta untuk memprediksi, membandingkan, dan menilai dampak yang timbul dari keputusan yang diambil.

Bahri (2016) menyatakan laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan disajikan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada akuntan oleh pihak pemilik perusahaan. Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga diharuskannya untuk menyajikan secara wajar.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi tugas oleh pemilik perusahaan pada akhir periode dalam bentuk data keuangan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan

pihak diluar perusahaan yang berkepentingan dengan aktivitas perusahaan tersebut.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan bertujuan memberikan suatu informasi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang di percayakan kepada pihak manajemen (Bahri, 2016).

Menurut PSAK No 1 paragraf 10 tahun 2012 laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi beberapa pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Kegunaan lain dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan yang dibutuhkan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dapat dikendalikan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Bahri (2016) menyatakan komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK Umum (IFRS) terdiri dari, laporan laba-rugi,

laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan Munawir (2002) menyatakan laporan keuangan terdiri dari:

a. Neraca

Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah kekayaan perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal sendiri perusahaan pada satu periode tertentu (Munawir,2002). Harahab (2002) menyatakan bahwa neraca adalah suatu laporan yang menampilkan sumber ekonomis perusahaan atau aset, berbagai kewajiban atau hutang perusahaan, dan hak dari para pemilik perusahaan yang mereka tanamkan pada perusahaan tersebut atau modal pemilik suatu saat tertentu

Neraca mempunyai dua bagian yang harus selalu seimbang, dan neraca harus disusun secara sistematis karena neraca merupakan sebuah gambaran dari kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu.

b. Laporan Laba-Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan keuntungan atau kerugian perusahaan dalam suatu waktu tertentu (Husnan, 2015). Munawir (2002) mengatakan bahwa laporan laba rugi merupakan suatu

laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Perhitungan laba rugi perusahaan harus disusun sebaik mungkin sehingga dapat menunjukkan gambaran dari kegiatan perusahaan dan hasil dari kegiatan tersebut.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan menyebabkan perubahan modal sendiri.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang dilaporkan dalam neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca menunjukkan besar aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki perusahaan, sementara laporan laba rugi menggambarkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan juga digunakan untuk memahami keputusan keuangan perusahaan.

2.1.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut PSAK No 1 paragraf 24 tahun 2012 terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu :

a. Dapat Dipahami

Kemudahan laporan keuangan untuk segera dapat dipahami oleh pengguna merupakan kualitas penting dalam

laporan keuangan. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila memberikan informasi yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat Dibandingkan

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomis.

2.1.3 Laporan Tahunan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan laporan resmi mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam satu periode, laporan ini berisikan laporan keuangan dasar, analisi manajemen atas operasi tahun lalu, serta pendapat mengenai prospek perusahaan di masa datang, laporan ini juga memberikan gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan perusahaan (Anggarwal, 2013).

Sudayat (2013) menjelaskan, laporan tahunan ialah laporan resmi tentang keadaan keuangan emiten dalam jangka waktu satu tahun. Laporan ini harus disampaikan kepada pemegang saham untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian disahkan sebagai laporan tahunan resmi perusahaan.

Sedangkan Suta (2012) menyatakan laporan tahunan adalah laporan perkembangan pencapaian keberhasilan yang mampu diraih perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.

Laporan tahunan wajib disampaikan oleh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pelaporan kegiatan selama satu periode yang nantinya akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Sudayat, 2013)

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan tahunan ialah laporan resmi yang disajikan oleh perusahaan atas perkembangan pencapaian keberhasilan dalam jangka waktu satu tahun mengenai laporan keuangan dasar, analisis manajemen atas operasi tahun lau, serta pendapat mengenai tujuan perusahaan di masa yang akan datang.

2.1.3.2 Komponen Laporan Tahunan

Menurut Needles, *et al.* (1995) dalam Suta (2012), laporan tahunan terbentuk atas tujuh komponen utama, yaitu:

- a. Sambutan direktur utama kepada para pemegang saham
Direktur utama menjelaskan tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu dan prospek perusahaan kedepannya kepada para pemegang saham.
- b. Ikhtisar data keuangan

Bagian ini menyajikan data keuangan penting selama 10 tahun terakhir dilengkapi dengan grafik untuk mempermudah pengguna laporan tahunan dalam melihat

tren pergerakan keuangan perusahaan dan termasuk juga data non keuangan seperti jumlah tool yang dimiliki dari periode ke periode.

c. Laporan keuangan

Bagian ini menyajikan empat jenis laporan keuangan yang wajib, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tujuannya untuk membantu pengguna dalam membandingkan kinerja perusahaan periode berjalan dengan periode sebelumnya.

d. Catatan atas laporan keuangan

Bagian ini berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan data yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- Ringkasan prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan transaksinya
- Catatan penjelasan atas item yang disajikan dalam laporan keuangan
- Catatan yang berisi informasi lengkap

e. Laporan pertanggungjawaban manajemen

Menyajikan pernyataan tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan dan struktur pengendalian internal perusahaan.

f. Hasil diskusi dan analisis manajemen

Bagian ini menyajikan bagaimana manajemen akan melakukan analisis dengan membandingkan kinerja periode berjalan dengan beberapa periode sebelumnya dan melakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

g. Laporan hasil audit

Bagian ini menyajikan hasil dari proses audit yang dilakukan oleh auditor berupa opini audit atas penyajian laporan keuangan perusahaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komponen laporan tahunan menunjukkan segala informasi yang terdapat pada perusahaan mulai dari sambutan kepala direktur sampai dengan laporan auditor atas opini yang diberikan mengenai laporan keuangan perusahaan.

2.1.4 Audit

2.1.4.1 Pengertian Audit

Auditing adalah suatu proses yang sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat hubungan antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2002).

Simamora (2002) mendefinisikan auditing menurut *The American Accounting Association Commitee On Basic Auditing Concept* adalah sebagai proses sistematis pencarian serta pengevaluasian secara obyektif bukti mengenai asersi mengenai peristiwa dan tindakan ekonomik untuk meyakinkan kadar kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Halim (2001) menjelaskan definisi audit yang sangat terkenal adalah definisi yang berasal dari ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concept*) yang mendefinisikan auditing sebagai :

Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara

asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit adalah serangkaian proses dan prosedur yang terstruktur untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi yang dibuat oleh individu atau entitas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan hasilnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, masyarakat luas , dan lain-lain.

2.1.4.2 Standar Audit

Auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan. Untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit maka diperlukan suatu kriteria. Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing. Simamora (2002) mengemukakan standar auditing yang merupakan standar otoritatif yang harus dipatuhi oleh akuntan publik terdaftar ketika melakukan perikatan audit di Indonesia, adalah instrumen profesi auditing untuk memastikan mutu pelaksanaan audit.

Halim (2001) menjelaskan secara lengkap, seperti tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik, standar auditing adalah sebagai berikut :

A. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.

Standar pertama ini menuntut kompetensi teknis seorang auditor yang melaksanakan audit.

Kompetensi ini ditentukan oleh tiga faktor yaitu :

- Pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor
 - Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing
 - Pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni karier auditor profesional.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor.

Auditor juga dituntut independen atau bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan auditing dan melaporkan temuan serta dalam memberikan pendapat.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Auditor yang berpengalaman harus mengkaji secara kritis pekerjaan dan judgement yang dibuat oleh para stafnya. Kualitas jasa auditor sangat tergantung pada kecermatan dan keseksamaan dalam melaksanakan audit dan dalam menyusun laporan audit

B. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan smestinya.

Pekerjaan mengaudit harus direncanakan secara memadai agar audit dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Meskipun auditor boleh mempekerjakan para asisten, tetapi tanggung jawab atas pekerjaan tersebut tetap berada ditangan auditor. Oleh karena itu, auditor harus mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi para asistennya.

2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

Pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien akan digunakan untuk :

- Menentukan mengidentifikasi salah saji potensial

- Mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material
 - Merancang pengujian substantif
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Audit harus menghimpun *evidential matter* (hal-hal yang bersifat membuktikan) dan tidak ekeदार *evident* atau bukti konkrit sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien.

C. Standar Pelaporan

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Standar ini mengharuskan auditor untuk mengidentifikasi dan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen.

2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode

berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.

Konsistensi merupakan suatu konsep didalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan untuk menghindari informasi yang menyesatkan.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.

Standar ini berkaitan erat dengan informasi tambahan sebagai pendukung dan pelengkap laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan maupun bentuk pengungkapan lainnya.

4. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan

keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadikan audit yang bermutu atau dapat dipercaya maka terdapat ukuran/kriteria yang harus dijalankan dalam proses pengauditan.

2.1.5 Audit Delay

2.1.5.1 Pengertian Audit Delay

Audit delay ialah interval waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan (31 Desember) sampai dengan tanggal pelaporan laporan keuangan auditan. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk perusahaan go publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan (Putri dan Asyik, 2015; Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). Ketepatan waktu pelaporan diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin, sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Putri dan Asyik, 2015).

Novit (2016) menjelaskan, *audit delay* merupakan jeda waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugasnya, yaitu diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. Lamanya proses penyelesaian audit akan berdampak pada reaksi investor maupun masyarakat umum. Sehingga akan berakibat pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemakai laporan keuangan.

Audit delay ialah penundaan publikasi laporan keuangan kepada publik yang disebabkan adanya proses audit yang lama dan dihitung dengan cara menjumlahkan hari antara tanggal laporan keuangan per periode yang diterbitkan perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor independen dikeluarkan (Carshaw & Kaplan, 1991 dalam Eka (2014)).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, *audit delay* merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya yang dihitung secara kuantitatif dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan auditor *independen*. *Audit delay* ini akan menyebabkan terlambatnya perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik, sehingga akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan.

2.5.1.2 Lamanya Waktu *Audit Delay*

Perusahaan go public harus menyerahkan laporan keuangan tahunannya disertai dengan opini auditor kepada Bapepam-Lembaga Keuangan dan mengumumkannya kepada publik paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku laporan keuangan (Sari, 2011).

Angruningrum dan Wirakusuma (2013) juga menjelaskan panjangnya masa audit delay berbanding lurus dengan lamanya masa pekerjaan lapangan yang diselesaikan auditor sehingga semakin lama pekerjaan lapangan maka semakin lama audit delay yang terjadi. Apabila laporan keuangan disajikan terlambat maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan.

Di Yunani, Leventis *dkk* (2005) dalam Al-Ghanem dan Hegazy (2011) menemukan berbagai macam waktu antara keuangan akhir tahun dan tanggal laporan audit, dengan waktu terpendek 30 hari dan terpanjang 158 hari (mendekati batas legislatif 160 hari di waktu itu); penundaan audit rata-rata adalah 98 hari. Studi ini menemukan bahwa di pasar keuangan Kuwait, informasi keuangan yang diaudit telah dibuat tersedia untuk umum rata-rata 57 dan 62 hari selama tahun 2006 dan

2007, masing-masing. Temuan ini menunjukkan, rata-rata, periode penundaan audit yang lebih pendek dibandingkan dengan Spanyol 85,5 hari (Bonson-Ponte *dkk* 2008 dalam Al-Ghanem dan Hegazy, 2011), Yunani 98 hari (Leventis *dkk* 2005 dalam Al-Ghanem dan Hegazy, 2011), dan Hong Kong 109 hari (Ng dan Tai, 1994 dalam Al-Ghanem dan Hegazy, 2011).

2.5.1.3 Pengukuran *Audit Delay*

Audit Delay diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor *independen* atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Setiawan, 2013). Fiatmoko (2015) menyatakan bahwa audit delay diukur secara kuantitatif yaitu jumlah hari yang dihitung dari tanggal penutupan tahun buku hingga diterbitkannya laporan auditor independen. variabel ini diukur dengan rumus (Saputri, 2016):

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

2.1.6 Ukuran Perusahaan

1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan (Setiawan, 2013). Semakin

besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin dikenal oleh masyarakat dan semakin besar perusahaan tersebut (Sunaningsih, 2014).

Sari (2011) menjelaskan, ukuran perusahaan ialah ukuran besar kecilnya perusahaan yang dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, variabilitas, dan intensitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Luasnya operasional perusahaan berbanding lurus dengan tingginya transaksi yang dilakukan. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki kompleksitas operasional yang tinggi, mulai dengan membeli bahan baku kemudian mengolahnya hingga menjadi barang jadi serta menjualnya.

Sedangkan Mumpuni (2011) mendefinisikan ukuran perusahaan ialah gambaran besar kecilnya perusahaan yang dinilai berdasar ukuran nominal perusahaan yaitu jumlah kekayaan aset dan total penjualan perusahaan dalam jangka satu periode penjualan. Kekayaan serta penjualan yang tinggi menunjukkan kinerja dan pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik serta akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Adanya pengendalian internal yang lebih kuat didalam perusahaan, maka perusahaan besar

cenderung akan mengurangi kesalahan pelaporan keuangan yang mungkin terjadi dan menjadikan auditor lebih cepat dalam menilai keuangan perusahaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, ukuran perusahaan merupakan gambaran suatu perusahaan yang diukur dari luas operasional perusahaan serta kekayaan aset perusahaan dalam satu periode.

2. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Penelitian ini mengukur ukuran perusahaan dengan nilai logaritma natural dari total asset mengacu pada penelitian Kartini dan Tulus (2008) dalam Fanny (2017), dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Asset})$$

Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Lucyanda dan Nura'ni (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan motivasi untuk bisa mengurangi audit delay, karena perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah.

2.1.7 Kompleksitas Operasi

1. Pengertian Kompleksitas Operasi

Kompleksitas operasi merupakan luasnya atau banyaknya perusahaan anak serta unit organisasi yang dimiliki oleh perusahaan go publik (Martius, 2012 dalam Kholishah (2013), Ariyani dan Budiarta (2014)). Adanya kompleksitas operasi pada perusahaan ini merupakan dampak langsung dari pembagian pekerjaan dan pembentukan departemen yang berfokus pada jumlah unit yang berbeda secara riil. Organisasi dengan berbagai jenis pekerjaan dan unit menimbulkan masalah manajerial dan organisasi yang lebih rumit karena terjadi ketergantungan yang semakin kompleks (Martius, 2012 dalam Kholishah, 2013).

Widosari (2012) menyatakan, tingkat kompleksitas operasi perusahaan bergantung pada jumlah dan unit operasi serta diversifikasi jalur produk dan pasar yang dimiliki perusahaan. Luasnya kompleksitas operasi serta cabang dan diversifikasi jalur produk ini dapat mempengaruhi lamanya auditor dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini terjadi karena anak perusahaan yang dimiliki tidak hanya terdapat didalam negeri namun juga terdapat diluar negeri, maka semakin rumit pula laporan keuangan yang dinilai oleh auditor karena adanya laporan keuangan konsolidasian.

Che-Ahmad (2008) dalam Sutamat (2017) menjelaskan jumlah anak yang dimiliki suatu perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki unit operasi yang lebih banyak dan luas yang harus diperiksa pada setiap transaksi dan catatan-catatan lain yang menyertainya, sehingga hal ini berakibat pada lamanya auditor dalam memeriksa transaksi tersebut dan menyebabkan terjadinya *audit delay* yang lebih panjang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kompleksitas operasi merupakan luas atau banyaknya perusahaan anak yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin luas dan banyak perusahaan anak yang dimiliki akan menimbulkan masalah yang rumit karena terjadinya ketergantungan yang kompleks antara berbagai jenis unit dan jumlah pekerjaan yang berbeda.

2. ★ Pengukuran Kompleksitas Operasi ★

Kompleksitas operasi diukur dari ada tidaknya perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan sampel. Ariyani dan Budiarta (2014) menjelaskan tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya, lebih cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik.

Widosari (2012) menyatakan kompleksitas operasi diukur dengan jumlah anak yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki anak yang lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih panjang bagi auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya.

2.1.8 Opini Auditor

1. Pengertian Opini Audit

Opini Audit ialah suatu pendapat yang diberikan oleh seorang auditor kepada klien-kliennya atas laporan keuangan yang telah di audit untuk menentukan apakah laporan tersebut wajar tanpa pengecualian atau tidak (Lubis, 2015). Auditor sebagai pihak ke tiga dituntut secara independen untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan akan segera melaporkan laporan keuangannya kepada publik apabila dinilai secara wajar oleh auditor.

Wijayanti (2014) menyatakan, opini auditor merupakan kesimpulan yang diberikan oleh auditor berdasar hasil audit. Seorang auditor menyatakan pendapatnya berdasar standar audit yang berlaku serta atas temuan-temuannya.

Pendapat auditor sangatlah penting bagi pengguna laporan keuangan, karena suatu pendapat yang baik oleh auditor untuk perusahaan maka akan menjadikan kepercayaan yang lebih tinggi bagi pengguna terhadap perusahaan untuk mengambil keputusan yang baik serta berinvestasi kepada perusahaan.

Sesuai dengan standar pelaporan ke empat yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Profesional Akuntan Publik, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersil bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2. Tipe Opini Audit

Mulyadi (2002) dalam Sunaningsih (2014) menjelaskan lima tipe opini yang dapat diberikan oleh auditor adalah sebagai berikut:

a. Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan

berdasarkan pada standar audit yang berlaku, penyajian laporan keuangan sesuai dengan PABU, dan tidak terdapat kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.

b. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan
(*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit, penyajian laporan keuangan sesuai dengan PABU, tetapi terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan satu paragraf penjelasan meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian, seperti keraguan auditor terhadap kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*), penjelasan mengenai opini auditor lain yang dijadikan pertimbangan, serta adanya perubahan kebijakan perusahaan.

c. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor memberikan *qualified opinion* jika lingkup audit dibatasi oleh klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting dengan tidak diperolehnya informasi penting karena hal-hal di luar kuasa klien maupun auditor, terdapat salah saji material, serta penyusunan laporan keuangan yang tidak konsisten dengan PABU.

d. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berlaku Umum).

b. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor tidak memberikan pendapat apabila ada pembatasan yang luar biasa terhadap ruang lingkup audit oleh klien atau karena kondisi tertentu, dan/atau auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

3. Pengukuran Opini Audit

Opini Audit diukur dengan mengklasifikasikan pendapat audit menjadi dua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar dan tidak memberikan pendapat (*qualified opinion*) (Fiatmoko, 2015).

Menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam Lubis (2015), *audit delay* lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion*. Hal ini dikarenakan dalam proses pemberian pendapat *qualified* terhadap perusahaan tersebut melibatkan negosiasi dengan klien,

konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup audit.

2.1.9 Ukuran Kantor Akuntan Publik

1. Pengertian Kantor Akuntan Publik

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 423/KMK.06/2002 Tanggal 30 September 2002 Tentang Jasa Akuntan Publik menyatakan Kantor Akuntan Publik atau disingkat dengan KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan kepada publik diminta untuk menggunakan jasa KAP yang mempunyai nama baik atau jasa KAP yang besar, sehingga akan terjamin keakuratan dan kepercayaan serta untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut.

Jusup (2001) dalam Saputri (2016) menjelaskan Kantor Akuntan Publik ialah suatu lembaga yang telah diberikan ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah untuk Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya. KAP besar diperkirakan mampu melakukan audit secara lebih efisien, terpercaya, dan mempunyai fleksibilitas yang lebih besar untuk segera menyelesaikan pekerjaannya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sehingga

informasi atas laporan keuangan akan segera diterima oleh pengguna dan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi.

Astikawati (2013) menyatakan, Kantor Akuntan Publik merupakan suatu lembaga untuk wadah bagi akuntan publik menjalankan pekerjaannya yang telah memiliki ijin dari Menteri Keuangan. KAP yang bereputasi baik dinilai akan lebih cepat dalam menyelesaikan tugas auditannya karena sudah terjamin profesionalitasnya.

Dari penjelasan diatas maka disimpulkan, Kantor Akuntan Publik merupakan suatu lembaga resmi yang telah diberikan ijin Oleh Menteri Keuangan yang diberikan kepada Akuntan Publik sebagai wadah untuk menjalankan pekerjaannya.

2. Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik

Terdapat banyak sekali KAP yang tergolong KAP besar, sedang, maupun kecil yang ada di Indonesia. Untuk mengukur besar atau kecilnya sebuah KAP, Adityasih (2010) dalam Christiawan (2014) mengelompokan KAP Indonesia berdasarkan jumlah auditornya yaitu KAP BIG 4, KAP Menengah, dan KAP Kecil:

a. KAP BIG 4 (KAP *First Tier*)

Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah Profesional Staffdiatas 400 orang yang terdiri dari

Pricewaterhouse Cooper, deloitte, KPMG, dan Ernst & Young. KAP tersebut adalah KAP asing yang bekerjasama dengan KAP Indonesia berupa network maupun asosiasi.

b. KAP Menengah (KAP *Second Tier*)

Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah profesional staff antara 100-400 orang.

c. KAP kecil (KAP *Third Tier*)

Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah profesional staff dibawah 100 orang.

Sedangkan Loebbeck (1996) dalam Astikawati (2013) mengategorikan ukuran KAP menjadi empat, yaitu:

a. Kantor Akuntan Publik Internasional “*The Big Four*”

Terdapat empat kantor akuntan yang terbesar di Amerika Serikat yang biasa disebut “*The Big Four*”. Masing-masing mempunyai kantor disetiap kota diseluruh dunia termasuk di Indonesia.

b. Kantor Akuntan Publik Nasional

Layanan yang diberikan KAP ini sama dengan pelayanan “*The Big Six*” dan melancarkan persaingan langsung dengan mereka dalam hal menarik klien. KAP ini juga memiliki hubungan dengan KAP diluar negeri sehingga juga memiliki potensi Internasional.

c. Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional

KAP ini hanya melayani klien dalam jangkauan areanya dan membuka cabang di daerah lain yang terpusat di Pulau Jawa.

d. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil

KAP ini memiliki kurang dari 25 tenaga profesional dalam satu kantor. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan yang berhubungan terutama dengan badan organisasi nirlaba, meskipun diantaranya melayani perusahaan yang telah *go public*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kategori ukuran KAP terdiri atas KAP dengan lingkup Internasional dan KAP dengan lingkup regional, bahkan juga terdapat KAP yang hanya menilai perusahaan nirlaba saja.

3. Pengukuran Ukuran Kantor Akuntan Publik

Sari (2011) menjelaskan, ukuran KAP dinilai berdasar jumlah karyawan, jumlah klien, serta reputasinya. Penelitian ini mengukur ukuran KAP dengan mengklasifikasikan menjadi dua yaitu KAP *big four* dan KAP *non big four* (Fiatmoko, 2015).

Menurut Turel (2010) dalam Angruningrum (2013) KAP yang menjadi bagian dari Big Four mampu mengaudit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam penjadwalan audit sehingga audit dapat diselesaikan tepat waktu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

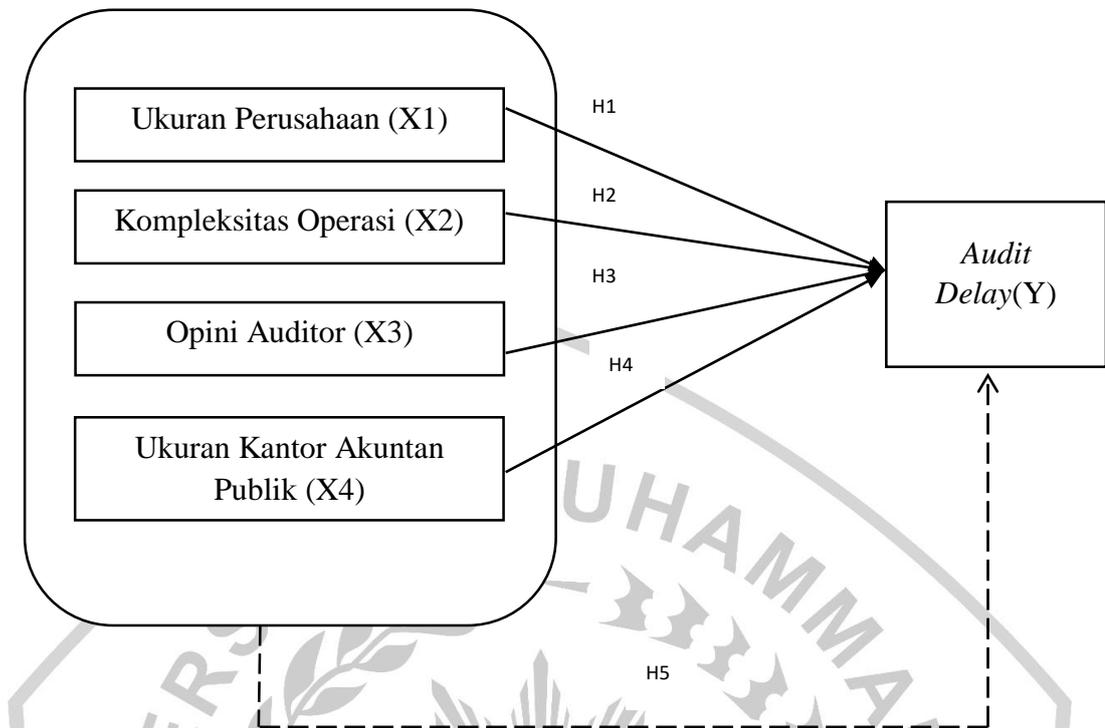
No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
1	Widyastuti dan Astika, 2017	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan Dan Jenis Industri Terhadap <i>Audit Delay</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara individual variabel ukuran perusahaan dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh pada <i>audit delay</i> , sedangkan jenis industri tidak berpengaruh pada <i>Audit Delay</i> .
2	Kusumawar dani, 2013	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i> Pada Perusahaan Manufaktur	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik dan opini auditor sudah dapat mempengaruhi <i>audit delay</i> .
3	Sutamat, 2017	Analisis Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Audit Delay</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> sedangkan leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
4	Saputri, 2016	Analisis Pengaruh Total Aset, Solvabilitas, Opini Auditor, Likuiditas, Dan Uuran KAP Terhadap <i>Audit Delay</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset, solvabilitas, opini auditor berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan likuiditas dan ukuran KAP tidak

			berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
5	Wijayanti, 2014	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini auditor berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> , sefangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> .

Sumber : beberapa penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay*, sehingga dalam penelitian kali ini peneliti mengambil variabel independen ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, opini auditor, dan ukuran KAP yang akan mempengaruhi lamanya *audit delay*.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

— : Simultan/ Bersama-sama

— : Parsial

Kerangka pemikiran sebagaimana ditunjukkan gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa *audit delay* sebagai variabel dependen (Y) dipengaruhi secara parsial dan simultan oleh ukuran perusahaan (X₁), kompleksitas operasi (X₂), opini auditor (X₃), dan ukuran kantor akuntan publik (X₄). Ukuran perusahaan adalah skala penentu besar kecilnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang berskala besar akan lebih cepat melaporkan laporan keuangannya karena tuntutan dari investor, sehingga semakin besar perusahaan maka audit delay akan semakin pendek.

Kompleksitas operasi diukur dari ada tidaknya perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan sampel. Semakin luas dan banyak anak perusahaan yang dimiliki menjadikan auditor membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengauditan, sehingga menyebabkan audit delay semakin lama dan berdampak pada terlambatnya publikasi laporan keuangan perusahaan.

Opini auditor merupakan suatu pendapat yang diberikan oleh seorang auditor atas penyajian laporan keuangan oleh perusahaan. Semakin baik/wajar opini yang diberikan oleh seorang auditor maka audit delay semakin pendek, hal ini disebabkan perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian akan segera melaporkan laporan keuangannya kepada publik.

Perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four akan mengalami audit delay semakin pendek, hal ini dikarenakan semakin baik/besar KAP maka akan terjamin kredibilitas serta profesionalitas KAP tersebut dan menjadikan semakin cepat pula penyelesaian audit oleh auditor. Secara bersama-sama variabel ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, opini auditor, serta ukuran KAP dinilai berpengaruh terhadap *audit delay* disebabkan perusahaan berskala besar dengan banyak anak perusahaan serta opini auditor yang baik oleh KAP yang berafiliasi besar akan mempercepat dan memperlambat auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Manajemen perusahaan berskala besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah yang dapat mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan memudahkan auditor dalam melakukan proses audit. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung mengalami tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit lebih awal, sehingga semakin besar perusahaan maka *audit delay* semakin pendek.

Rohmana (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* karena perusahaan besar umumnya sudah memiliki sistem pengendalian internal yang baik.

Dari pemaparan diatas dapat disusun hipotesis :

H_{01} = Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*

H_{a1} = Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay*

2.4.2 Pengaruh Kompleksitas Operasi terhadap *Audit Delay*

Ahmad dan Abidin (2008) dalam Rohmana (2017) menyatakan kompleksitas perusahaan berdampak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan, hal tersebut dikarenakan auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas audit pada perusahaan klien yang mengalami peningkatan kompleksitas perusahaan. Semakin banyak

perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan sampel maka waktu penyelesaian audit semakin panjang.

Widyastuti dan Astika (2017) menemukan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan pada *audit delay*. Ini berarti kompleksitas operasi perusahaan, cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik.

Dari pemaparan diatas dapat disusun hipotesis :

H₀₂ = Kompleksitas Operasi tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*

H_{a2} = Kompleksitas Operasi berpengaruh terhadap *Audit Delay*

2.4.3 Pengaruh Opini Auditor terhadap *Audit Delay*

Investor hanya akan percaya pada laporan keuangan yang mendapat opini positif dari seorang auditor. Perusahaan yang mendapat opini negatif dari auditor cenderung akan menutupi laporan keuangannya sehingga akan memperpanjang *audit delay* (Kusumawardani, 2013). Disamping itu penerimaan opini selain *qualified* merupakan indikasi terjadinya konflik antara auditor dan perusahaan yang pada akhirnya memperpanjang *audit delay*. Jadi, perusahaan yang tidak menerima opini audit standar *unqualified opinion* mengalami *audit delay* yang panjang (Kartika, 2011).

Rohmana (2017) menemukan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*, karena ketika perusahaan memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian, auditor akan mencari bukti-bukti penyebab dikeluarkannya opini tersebut, sehingga memakan waktu yang cukup lama dan mengindikasikan terjadinya *audit delay* yang panjang atau lebih lama.

Dari pemaparan diatas dapat disusun hipotesis :

H₀₃ = Opini Auditor tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*

H_{a3} = Opini Auditor berpengaruh terhadap *Audit Delay*

2.4.4 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay*

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) yang besar berpengaruh terhadap cepatnya proses penyelesaian laporan keuangan. Semakin besar kantor akuntan publik yang terdapat di suatu perusahaan, maka akan semakin cepat pula proses penyelesaian laporan keuangannya, begitu sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya sumber daya manusia yang lebih banyak pada kantor akuntan publik yang besar sehingga memiliki fleksibilitas tinggi dalam penjadwalan audit (Wijayanti, Andini, dan Raharjo, 2017) .

Kusumawardani (2013) menemukan adanya pengaruh ukuran KAP terhadap *Audit Delay*. Semakin besar ukuran KAP maka akan menjamin suatu kredibilitas yang baik bagi KAP itu sendiri dan menjadikan *audit delay* semakin pendek. Kantor Akuntan Publik yang sudah besar tentunya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas

sehingga mampu menghasilkan audit laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh perusahaan dan para investor.

Dari pemaparan diatas dapat disusun hipotesis :

H₀₄ = Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*

H_{a4} = Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Audit Delay*

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi, Opini Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay*

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang berskala besar akan lebih cepat melaporkan laporan keuangannya karena tuntutan dari investor, begitu juga dengan opini auditor dan ukuran Kantor Akuntan Publik semakin baik opini yang diberikan oleh auditor dari KAP Big Four maka semakin cepat pula perusahaan melaporkan laporan auditornya kepada publik. Berbeda dengan kompleksitas operasi perusahaan yang mana semakin banyak perusahaan anak yang dimiliki maka pelaporan laporan keuangan akan lebih lama.

Dari pemaparan diatas dapat disusun hipotesis :

H₀₅ = Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi, Opini Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*

H_{a5} = Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi, Opini Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *Audit Delay*